

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disebut sebagai KUHP Nasional).
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM. Dalam *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* (Vol. 6, Nomor 2).

Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). *TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN HUKUM*.  
<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep->

ANT. (2013, November). *KPK Kembali Periksa Istri Akil Mochtar*. Hukum Online.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-kembali-periksa-istri-akil-mochtar-lt52774ce9a0b99/>

Aprilia Samurine, C. (2019). *IMPLEMENTASI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*.

BBC News Indonesia. (2024, September). *Dugaan gratifikasi Kaesang 'seharusnya bisa digunakan KPK untuk usut keluarga Jokowi.'*  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw52jj7lgzo>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Efritadewi, A. (2020). *MODUL HUKUM PIDANA* (1 ed.). UMRAH Press.

Fuady, M. (2023). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep: viii* (1 ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

- Hakim, L. (2019). IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP). Dalam *Jurnal Krtha Bhayangkara* (Vol. 13, Nomor 1). <http://ahmadbahiej.blogspot.co.id>
- Hakim, L. (2020). *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. Deepublish.
- Ilmi Yakup, B., Agustriadi, & Wakito. Budi. (2022). *LANDASAN PENGATURAN GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI* (Vol. 5, Nomor DESEMBER).
- Ji-hyoung, S. (2024, Oktober 2). *Prosecution closes “Dior bag” case amid opposition uproar*. The Korea Herald. <https://www.koreaherald.com/article/3485986>
- Juanda, H. E. (2017). *PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING)*.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. Dalam *Jurnal Crepido* (Vol. 01). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Karina, G. D., & Kanggas, F. Z. H. (2023). *Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi* (Vol. 6, Nomor 2).
- Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum*, 5.

- Lumbanraja, A. D. (2019). *URGENSI PERAN AKTIF HAKIM PADA PERADILAN TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK*.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). *GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAPORAN PENERIMA GRATIFIKASI*. 19(1), 155–173. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>
- Mihardja, R., & Kholis, E. (2023). “Oknum” Penegak Hukum Kok Korupsi? Viii (Pertama). Balai Pustaka.
- Monteiro, J. M. (2018). *TEORI PENEMUAN HUKUM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG*.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (i). Mataram University Press.
- Mulyono, A. (2016a). *Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan PENGARUH ASPEK KULTUR HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA (PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA)*.
- Mulyono, A. (2016b). *PENGARUH ASPEK KULTUR HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA (PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA)*.
- Novara Jaya, A. E., Majid, I., Ayu Utami, G., & Goncalves Klau, R. (2024). *Gratifikasi dalam Perspektif Etika dan Hukum: Antara Budaya Pemberian dan Korupsi*.

- Pramesti, R., Aryaputra, M. I., & Ratna Juita, S. (2021). *GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. 2(2).
- Rachmadani, W., Ismunarno, & Slamet, S. (2021). *PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA* (Vol. 10, Nomor 2).  
<https://www.>
- Rahayu Putri Rusadi Fry Anditya, Sukinta, & Dwi Baskoro, B. (2019). *PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA*.
- Rashid, R. (2024, Januari 26). *The first lady and the Dior bag: the scandal shaking up South Korean politics*. The Guardian.  
<https://www.theguardian.com/world/2024/jan/26/the-first-lady-and-the-dior-bag-the-scandal-shaking-up-south-korean-politics#img-1>
- Rohman, Moh. M., Purwoto, A., Musahib, A. R., Rumalean, Z. Z., Kurniawan, Romdoni, M., Ingratubun, F., Utami, R. A., Mahrida, BR, W., Wardani, D. E. K., & Hamid, A. (2023). *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA* (Vol. 1). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). Dalam *Journal Law and Government* (Vol. 2, Nomor 1).

- Saifullah, H., & Fadlian, A. (2024). *Analisis Praktik Korupsi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>
- Sari, H. P., & Ihsanuddin. (2024, November). *KPK Putuskan “Private Jet” Kaesang Bukan Gratifikasi, Ini Alasannya*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/01/18142381/kpk-putusan-private-jet-kaesang-bukan-gratifikasi-ini-alasannya>
- Simanjuntak, M. (2016). *MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Oleh* (Vol. 7, Nomor 1).
- Sriwidodo, J. (2019). *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA “Teori dan Praktek”* (1 ed.). Penerbit Kepel Press.
- Suyanto. (2018). *PENGANTAR HUKUM PIDANA* (1 ed., Vol. 1). DEEPUBLISH
- Syahrin, A., Anggust, M., & Alsa, A. A. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar: Buku Kesatu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (1 ed.). CV. Merdeka Kreasi Group.
- Tipikor, G. (2016). *Kejahatan Korupsi: Xii* (F. Jurdi, Ed.; Pertama). Rangkang Education.
- Yeon-soo, K. (2024, Oktober 2). *Prosecution drops charge against first lady over luxury bag scandal*. The Korea Times. <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/law->

crime/20241002/prosecution-drops-charge-against-first-lady-over-luxury-bag-scandal